

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyumedia Publishing, 1993.
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang, 2006.
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, PT. Raja grafindo, Jakarta, 2016.
- B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.
- Cheriff Basiouni, *Democracy: Its Principles and achievement*, Intra Parliamentary Union, Geneva, 1998.
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, AMP YKPN, Yogyakarta, 1991.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Dian Permata, *Politik Uang dan Pilkada*, *Jurnal Bawaslu*, Edisi januari 2017, Jakarta, 2017.
- Donny Gahral Adian, *Demokrasi Substansial*, Koekoesan, Jakarta, 2010.
- E. Aspinall & M. Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif 2014*, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Guy S. Goodwin-Gill, *Free and Fair Elections*, Inter Parliamentary Union, Geneva, 2006.
- Harold J. Laski Joenianto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Hendarmin Ranadirekha, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015.
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, UII Press, Jakarta.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Jurgen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, The MIT Press, Cambridge, 1999.
- Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta, 1999.
- K. Nisjhar, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997.
- L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu DI Indonesia Pasca Reformasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
- Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Disertasi, Alumni, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 1994.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015.
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Gramedia, Jakarta, 2007,
- Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Sumber Lain

Ade Marcelian Pande, Ida Ayu putu Widiati, I Wayan Arthanaya, Analisis Yuridis Monoy Politic Oleh Calon Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3–November 2021.

Agus Dedi, Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.

Amsari, Feri, Satjipto Rahardjo, *Jagat Ketertiban Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI edisi September 2009.

Budi Nuryanto, Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 01, No. 02, Juli 2021.

- Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10, No.1, 2013.
- Dedi Irawan, Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Maret, 2015.
- Deti Mega Purnamasari, Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak> , Diakses pada 1 Januari 2023.
- Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1 No. 2 2018.
- I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.
- Kamal Fahmi Kurnia dan Rika Santina, Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum, *Justicia Sains*, Vol. 03 No. 02 November 2018.
- Komite Independen Sadar Pemilu, *Pemilih Milenial dan Kontestasi Politik Elektoral (Evaluasi dan Hasil Penelitian Komite Independen Sadar Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019)*, Rua Aksara, Yogyakarta, 2019.
- Made Sumertana, I Nyoman Lemes, dan I Nyoman Gede Remaja, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum, *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 Desember 2021.
- Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019, *MPR RI*, Edisi Februari 2014.
- Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrullohi, Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa, : *Jurnal Antikorupsi*, Volume 6, Nomor 1.
- Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.

- Sun Fatayati, Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28 (1).
- Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.
- Wahyu Widodo, Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ,Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih
<http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/89>, diakses tanggal 7 November 2021
- Wiesje Fenny Wilar, Stakeholder Pemilu Dalam Menyukkseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019, *HOLISTIK*, Vol. 12 No. 1/ Januari-Maret 2019.